

---

## **Menggugat Negara Kesatuan: Menggali Wacana Kebangsaan Soetisna Sendjaja tentang Negara Serikat**

Irfal Mujaffar<sup>a, 1 \*</sup>,

<sup>a</sup> Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

<sup>1</sup> irfalmujaffar@unsil.ac.id

\* Corresponding author

### **Abstrak**

Ide federalisme yang telah dikubur oleh pemerintah RI kembali menyeruak pada pertengahan tahun 1950-an. Tidak meratanya distribusi kekuasaan dan ekonomi disinyalir menjadi faktor kuat yang membuat sejumlah kalangan menginginkan suatu bentuk susunan negara serikat ketimbang negara tunggal (kesatuan). Di Jawa Barat, ide tersebut disuarakan juga oleh sejumlah aktivis Sunda, salah satunya oleh Soetisna Sendjaja. Artikel ini membahas pemikiran Soetisna Sendjaja tentang negara serikat yang ditempatkan dalam konteks dinamika sosial-politik pasca-kemerdekaan. Dengan menggunakan metode sejarah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ide federalisme sebetulnya merupakan wacana yang sudah lama disuarakan Soetisna Sendjaja jauh sebelum kemerdekaan. Wacana tersebut kembali menemukan momentumnya selama dasawarsa kedua 1950-an. Spiritnya pun masih sama, hanya saja berada dalam konteks politik yang berbeda. Pada masa pergerakan, Soetisna Sendjaja menempatkan federalisme sebagai jalan yang ditempuh untuk membangun persatuan dan kemajuan bangsa demi cita-cita kemerdekaan. Maka di tahun 1950-an, wacana federalisme berubah menjadi suatu tuntutan bentuk susunan negara Indonesia yang telah merdeka, sekaligus sebagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tanah air.

**Kata kunci:** federalisme, unitarisme, negara serikat, Front Pemuda Sunda.

### **Abstract**

**Questioning the Unitary State: Exploring Soetisna Sendjaja's National Discourse on the Federal State**

The idea of federalism, which had been suppressed by the Indonesian government, resurfaced in the mid-1950s. The unequal distribution of power and economic resources was considered the main factor that led some segments of society to desire a federal state rather than a unitary state. In West Java, this idea was also voiced by several Sundanese activists, one of whom was Soetisna Sendjaja. This article examines Soetisna Sendjaja's thoughts on the federal state within the context of Indonesia's post-independence socio-political dynamics. Using historical methods, the results of this research show that the idea of federalism was actually a discourse that Soetisna Sendjaja had long advocated, long before independence. This discourse regained momentum during the second decade of the 1950s. The spirit remained the same, only within a different political context. During the independence movement, Soetisna Sendjaja believed in federalism as the path to building national unity and progress in pursuit of the ideals of independence. So in the 1950s, the discourse on federalism changed into a demand for the form of state structure of an independent Indonesia, as well as a solution offered to overcome various problems that occurred in Indonesia.

**Keywords:** Federalism, Unitarism, Federal State, Front Pemuda Sunda

## PENDAHULUAN

Dalam dasawarsa kedua setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, kondisi perpolitikan nasional mengalami keguncangan. Legitimasi terhadap pemerintah pusat lambat laun mulai luntur akibat tindakan-tindakannya yang dipandang semakin jauh dari kata adil. Tidak meratanya distribusi kekuasaan dan ekonomi telah memantik gelombang protes di berbagai daerah. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat memuncak saat krisis ekonomi mulai tampak semakin nyata memasuki tahun 1956. Muncul satu anggapan di daerah-daerah jika segala kekacuan yang terjadi adalah sebagai buntut dari kelalaian umum Jakarta (Ricklefs, 2010: 524).

Di lain pihak, kekecewaan juga menyebar dalam tubuh tentara. Pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang digerakkan oleh perwira Angkatan Darat kerap kali terjadi. Pada umumnya aksi yang dilakukan tentara ini dimaksudkan untuk memaksa pemerintah pusat agar mau memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada masalah di daerah-daerah.

Sampai 1957 gerakan-gerakan anti Jakarta pun berkembang secara simultan di luar Jawa<sup>1</sup> (Sundhaussen, 1988:186).

Disaat riak-riak protes di berbagai daerah menyeruak, ide federalisme yang sudah dikubur dalam-dalam oleh Soekarno kembali mencuat. Para pendukungnya mempercayai ide tersebut dapat menjadi solusi atas segala kekacauan yang terjadi. Kekuatan besarnya terdapat di pulau-pulau luar Jawa yang masih memiliki sejumlah pendukung. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah pusat yang lebih memerhatikan pembangunan di Jawa, disinyalir menjadi alasan kuat bangkitnya ide tersebut (Caldwell & Utrecht, 2011: 186). Sentimen etnis kembali tumbuh di tengah masyarakat. Diperparah dengan mundurnya Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, 1 Desember 1956, yang di anggap mewakili orang luar Jawa di pemerintahan (Ricklefs, 2010: 524-527).

Di Jawa Barat, ide federalisme juga disuarakan oleh para pemuda, terutama yang tergabung dalam Front Pemuda Sunda (FPS).<sup>2</sup> Famplet berjudul “*Hancurkan PNI dan Imperialisme Jawa*” yang ditulis oleh FPS, menandai momentum kebangkitan kembali ide federalisme di Jawa Barat. Famplet tersebut disebarluaskan pada 17 Agustus 1956, ketika presiden Soekarno berpidato memperingati hari kemerdekaan RI (Lubis, 2003: 196). Kejadian ini telah mendorong para aktivis untuk mengadakan “Kongres Pemuda Sunda” guna membicarakan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di wilayah Sunda. Salah satu hasil dari kongres tersebut adalah menyepakati berdirinya bentuk negara federasi (negara serikat) di Indonesia. Mereka percaya bahwa negara federasi dapat menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan terutama berkaitan dengan pelaksanaan keamanan, sosial-ekonomi dan kebudayaan di tanah air ketimbang negara kesatuan.

*“keamanan dan pelaksanaan sosial-ekonomi dan kebudayaan itu akan lebih terjamin dalam bentuk negara federasi yang akan menguntungkan semua*

<sup>1</sup> Pada 20 November 1956, Dewan Benteng yang diketuai oleh Letkol. Ahmad Husein secara resmi mengumumkan bahwa kelompoknya telah mengambil alih tanggung jawab pemerintahan Sumatera Tengah. Dua hari kemudian Kolonel Simbolon mengambil alih pemerintahan sipil Sumatera Utara. Panglima Kalimantan, Kolonel Abimanyu mengikuti langkah itu dengan memerintahkan penangkapan atas semua jajaran pejabat di pemerintahan pusat yang memasuki daerah yang berada di bawah komandonya. Pada 15 Januari 1957, Dewan Revolusi Garuda di bawah pimpinan Letkol Barlian juga mengambil alih kekuasaan pemerintahan Sumatera Selatan.

<sup>2</sup> FPS adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa organisasi pemuda Sunda yang telah berdiri sebelumnya, yaitu Putera Sunda (Bogor), Nonoman Sunda (Bandung), Mitra Sunda (Bandung), Daya Nonoman Sunda (Jakarta), dan Contact Bureau Jawa Barat (Yogyakarta) pada 18 Maret 1956 di Bogor.

*sukubangsa, daripada bentuk negara kesatuan. Karena itu Sunda harus dijadikan negara bagian Republik Indonesia*” (Rosidi, *et al.*, 2000: 358).

Di antara banyak aktivis Sunda, Soetisna Sendjaja jadi salah satu tokoh yang paling konsisten dalam menyuarakan wacana negara federasi di Indonesia. Gagasan tentang federalisme sudah ada sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ide yang diyakininya sebagai wujud pemerintahan terbaik bagi keberlangsungan bangsa yang multikultural ini, kembali didengungkan selama paruh kedua dekade 1950-an. Soetisna Sendjaja yang notabene dikenal sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di lingkungan orang Sunda, membuat ide-idenya selalu menjadi perhatian khalayak.<sup>3</sup> Gagasan-gagasannya tidak jarang berbual penentangan, termasuk itu datang dari Presiden Soekarno sendiri (Rosidi, *et al.*, 2000: 632). Perjuangannya dalam menegakkan federalisme di Indonesia pun menjadi sangat menarik karena pada saat itu Soetisna Sendjaja dianggap sebagai representasi gerakan politik orang Sunda, setelah terpilih menjadi anggota Konstituante mewakili Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis secara kritis permasalahan yang dikaji. Tahapan metode sejarah terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 2008: 42; Sjamsuddin, 2012: 74). Proses heuristik (pengumpulan sumber) berfokus pada sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji, terutama rekam jejak yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Soetisna Sendjaja tentang federalisme. Sumber-sumber tersebut meliputi tulisan-tulisan Soetisna Sendjaja di media cetak, seperti koran *Padjajaran* (1918), koran *Sipatahoenan* (1925), dan majalah *Kalawarta Kudjang* (1956). Lalu penelitian ini juga mengandalkan sumber hasil notulensi Sidang-sidang Konstituante (1959) yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Setelah sumber yang diperlukan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik (verifikasi) untuk menguji autentisitas dan kredibilitas sumber. Sumber-sumber yang telah melalui uji kritik lalu diinterpretasi atau ditafsirkan dan dianalisis untuk menjadi dasar rekonstruksi. Lalu masuk pada tahapan akhir berupa historiografi, yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis.

---

<sup>3</sup> Lihat dalam Mujaffar. “*Pemikiran Politik Soetisna Sendjaja Tahun 1918-1942*”. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia: tidak diterbitkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Federalisme: Wacana Kebangsaan dan Pembangunan Indonesia Merdeka**

Soetisna Sendjaja dikenal sebagai salah seorang aktivis pergerakan dan jurnalis media cetak berbahasa Sunda. Pria kelahiran Wanaraja, Garut, 27 Oktober 1890 ini selama masa pergerakan aktif di organisasi Paguyuban Pasundan. Pada 1930-an ia juga sempat menjadi ketua Nahdlatul Ulama (NU) Tasikmalaya. Soetisna Sendjaja juga dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam dunia jurnalistik Sunda. Sejumlah surat kabar berbahasa Sunda pernah ia nakhodai, mulai dari *Pasoendan* (1919-1921), *Siliwangi* (1921-1922), *Langlajang Domas* (1927-1928), majalah *Al-Mawa'idz* (1933), hingga *Kalawarta Kudjang* (1956). Koran *Sipatahoenan* (1923-1929) yang ia pimpin dan bidani tampil menjadi media perjuangan sekaligus corong politik masyarakat Sunda pada masanya (Mujaffar, 2017, hlm. 52).

Kiprah Soetisna Sendjaja dalam dunia politik berlanjut pada dekade 1950-an. Ia bergabung dengan organisasi Daya Sunda dan membentuk Partai Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) sebagai wadah yang diperuntukan bagi perjuangan politik orang Sunda di pemerintahan. Pada tahun 1955 Gerpis ikut Pemilu. Soetisna Sendjaja berhasil terpilih menjadi satu-satunya mewakili Gerpis di Konstituante (Rosidi, *et al.*, 2000: 632).

Di Konstituante, Soetisna Sendjaja aktif menyuarakan tuntutan atas kesejahteraan masyarakat Sunda setiap kali mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Salah satu yang cukup menyita perhatian adalah usahanya dalam mendorong bentuk negara federasi atau negara serikat di Indonesia, yang pada saat itu menjadi agenda politik sejumlah aktivis Sunda.<sup>4</sup>

Jika kita perhatikan kiprahnya, ide federalisme sebenarnya bukanlah hal baru bagi Soetisna Sendjaja. Gagasan ini sudah lama ia perjuangkan jauh sebelum menjadi agenda politik para aktivis Sunda (1956), lebih tepatnya saat ia menjadi aktivis di Paguyuban Pasundan. Lewat tulisan-tulisannya, Soetisna Sendjaja aktif menebar wacana kebangsaan dalam surat-surat kabar. Konsepsi kebangsaan yang ia bangun pada tahun 1918 dan 1925 tentang identitas bangsa Sunda, sebenarnya

<sup>4</sup> Bentuk negara federasi disepakati pada Kongres Pemuda Sunda tahun 1956 dan ditindaklanjuti oleh Konferensi Organisasi Kesundaan dan Tokoh-tokoh Sunda yang dilaksanakan pada 12 Mei 1956. Dalam konferensi tersebut, Soetisna Sendjaja menjadi salah seorang pembicara utamanya. (Lihat dalam Pidato Soetisna Sendjaja pada "Konperensi organisasi kasundaan djeung sepuh-sepuh Sunda". Majalah *Kalawarta Kujang*, Mei 1956)

telah banyak menyenggung ihwal federalisme. Hanya saja pada saat itu, konsep tersebut masih terbilang asing bagi sebagian besar masyarakat Sunda. Termasuk bagi Soetisna Sendjaja sendiri yang sama sekali tidak membicarakan mengenainya secara gamblang (Mujaffar, 2017, hlm. 56). Namun jika diperhatikan, konsep persatuan dan pembangunan yang ada dalam setiap tulisannya sudah memuat inti-inti federalisme sebagaimana yang menjadi pemahamannya di kemudian hari. Ini terlihat ketika ide-ide tersebut kembali Soetisna Sendjaja suarakan sepanjang tahun 1950-an, tatkala ia mendorong tegaknya negara federasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Ide persatuan yang digagas oleh Soetisna Sendjaja pada awal abad ke-20, turut mewarnai dinamika perkembangan nasionalisme yang sedang dibangun pemikir-pemikir Indonesia. Ketika itu, Soetisna Sendjaja menghadirkan konsep persatuan yang bertumpu pada heterogenitas sosiokultural bangsa pribumi di Indonesia. Di alam pikirnya, keberagaman suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat merupakan suatu kekuatan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ia pun terus mendorong agar kekuatan-kekuatan tersebut dapat dihimpun menjadi wujud persatuan yang kokoh. Persatuan menurutnya akan terwujud ketika bangsa-bangsa (suku bangsa) yang beraneka ragam tersebut bisa bekerjasama tanpa menanggalkan identitas kebangsaannya yang telah lama terbentuk. Maka dari itu, setiap suku bangsa yang ada di Indonesia bagi Soetisna Sendjaja tidak bisa dipaksakan agar seragam, biarkan masing-masing di antaranya berkontribusi dengan caranya sendiri-sendiri dalam rangka mewujudkan persatuan dan kemajuan bersama (Mujaffar, 2017: 64).

Bagi Soetisna Sendjaja semangat persatuan mesti dibangun atas dasar ikatan yang saling menguatkan, bukan berdasar paksaan yang abai terhadap batas-batas sosiokultural. Ia pun menganalogikan tiap-tiap bangsa pribumi di tanah Hindia sebagai sebatang lidi dengan karakter yang berbeda-beda. Menurutnya jika sebatang lidi yang berbeda-beda itu berdiri sendiri dan tidak diikatkan pada lidi-lidi yang lain, sebagus apa pun bentuknya, tetap akan mudah dipatahkan. Berbeda jika sebatang lidi itu diikatkan dengan lidi-lidi yang lain sehingga menjadi satu ikatan, meskipun karakternya berlainan, namun ikatan lidi-lidi tersebut menurutnya akan kuat dan sulit dipatahkan (Soetsen, 1918).

---

<sup>5</sup> Lihat pidato Soetisna Sendjaja dalam risalah Sidang Konstituante RI, 25 Mei 1959

Soetisna Sendjaja memandang bahwa keberanekaragaman suku bangsa pribumi di Indonesia, seperti Sunda, Jawa, Bugis, dan yang lainnya, adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa diganggu gugat. Menurutnya keberagaman itu harus tetap berlaku hingga bangsa Indonesia benar-benar berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi bangsa yang merdeka sepenuhnya. Bagi Soetisna Sendjaja, tolak ukur nasionalisme tidak bisa dilihat dari sejauh mana suatu bangsa mampu menghilangkan rasa kebangsaan tiap-tiap wilayah dan menggantinya dengan satu identitas nasional. Nasionalisme Indonesia menurutnya akan tercapai seiring dengan tumbuhnya spirit untuk memelihara identitas tiap-tiap wilayah dan suku bangsa dalam satu ikatan. Apabila perbedaan dapat terpelihara dengan baik, maka menurutnya persatuan juga akan terpelihara dengan baik (Soetsen, 1925).

Konsekuensi dari keberanekaragaman itu adalah adanya otoritas bagi setiap suku bangsa untuk mengelola dan memajukan tanah airnya masing-masing. Ide tersebut berangkat dari pemikiran Soetisna Sendjaja yang percaya bahwa kebutuhan suatu bangsa hanya akan dirasakan oleh bangsa itu sendiri yang memahami betul masalah-masalah yang terjadi disekitarnya. Maka dari itu, menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab atas segala permasalahan yang ada di tanah Sunda adalah orang Sunda sendiri. Begitupun dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Jawa, Madura, Bali, Bugis, dan lain sebagainya, merupakan tanggung jawab dari masyarakatnya (Mujaffar, 2017: 59).

Gagasan di atas juga menjadi suatu bentuk optimisme Soetisna Sendjaja yang memandang jika tiap-tiap perkumpulan bangsa pribumi memiliki potensi besar untuk melakukan suatu perubahan dalam rangka memajukan tanah airnya. Sama halnya dengan usaha-usaha yang dilakukan Paguyuban Pasundan ketika mengganti nama provinsi *West Java* menjadi Pasundan pada 1925, menurutnya jangan sampai ada anggapan bahwa orang Sunda akan memisahkan diri dari persatuan yang hendak dibangun. Penggunaan nama Pasundan sebagai nama provinsi dipercaya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat asli yang menempati daerah Jawa bagian Barat yang mayoritasnya bersuku Sunda. Nama Pasundan menurutnya sangat identik dengan identitas orang Sunda, sehingga apabila Pasundan diterapkan menjadi nama pemerintahan, diharapkan akan timbul keterpanggilan hati dan tertanam perasaan dalam diri masyarakat Sunda,

bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan pengelolaan negaranya sendiri, meskipun hanya bagian kecil saja dari luasnya Indonesia (Soetsen, 1925).

Pemikiran-pemikiran Soetisna Sendjaja tentang masalah kebangsaan nampaknya merepresentasikan prinsip dasar Paguyuban Pasundan dalam mewujudkan pembangunan dan persatuan Indonesia. Para anggotanya percaya bahwa perbedaan jalan perjuangan yang ditempuh oleh setiap organisasi kebangsaan merupakan modal utama untuk meraih cita-cita Indonesia merdeka. Ini terlihat ketika Paguyuban Pasundan memutuskan untuk bergabung dengan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPWI) yang berbentuk badan federasi pada 1927 (Suharto, 2002, hlm. 53). Dalam rapat pembentukan PPPWI, Paguyuban Pasundan diwakili oleh Soetisna Sendjaja, Otto Koesoemasoebroto, dan Bakrie Soeraatmadja (Amien, 2013, hlm. 34). Ikut sertanya Paguyuban Pasundan dalam PPPWI tidak serta merta menunjukkan perkumpulan itu menghendaki adanya persatuan nasional saja. Badan federasi yang memberikan ruang kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan arah perjuangannya masing-masing, sejalan dengan spirit perkumpulan itu yang ingin memperjuangkan Indonesia merdeka dengan cara meningkatkan kapasitas orang Sunda (Yahya, 2015).

Keterlibatan Paguyuban Pasundan dalam PPPWI secara tidak langsung menunjukkan sikapnya yang pro terhadap ide federasi di Indonesia. Sikap ini semakin terlihat setelah Budi Utomo lagi-lagi berinisiasi menyatukan partai-partai politik kebangsaan dalam bentuk fusi pada tahun 1931, seiring dengan terjadinya pertentangan dalam tubuh PPPWI<sup>6</sup> (Pringgodigdo, 1994, hlm. 133). Munculnya keinginan terhadap bentuk fusi dan meninggalkan bentuk federasi nampaknya menjadi perhatian serius Paguyuban Pasundan.

Dalam kongresnya ke-16 di Bogor (4-5 April 1931), Paguyuban Pasundan membahas secara khusus masalah tentang uni dan federasi. Maksud diuraikannya kedua hal itu adalah untuk menimbang jalan mana yang mesti ditempuh oleh Paguyuban Pasundan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Hasilnya, disepakati sebuah resolusi yang isinya bahwa Paguyuban Pasundan akan memperkuat dan memperbaiki *front* persatuan partai-partai politik – dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Pada 1935 Budi Utomo bersama organisasi kebangsaan lainnya berhasil meleburkan diri dalam Partai Indonesia Raya (Parindra), dan membubarkan diri dari badan federasi.

PPPKI – dalam bentuk federasi.<sup>7</sup> Perkumpulan itu berpendapat bahwa mengadakan fusi di antara partai-partai politik kebangsaan dengan tergesa-gesa tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Paguyuban Pasundan pun mengerti betul jika persatuan itu bisa terdapat dalam bentuk unitaristik, bisa juga dalam federalistis. Perkumpulan ini juga sangat menjunjung tinggi dan membutuhkan persatuan, hanya saja dalam mewujudkannya, Paguyuban Pasundan lebih memilih dengan jalan federasi (Suharto, 2002: 61). Federalisme pun menjadi cita-cita bersama anggota Paguyuban Pasundan dalam mewujudkan pembangunan persatuan Indonesia, ide tersebut juga tertanam kuat dalam diri Soetisna Sendjaja hingga masa kemerdekaan.

### **Menjadi Federalis di Negara Unitaris**

Kiprah Soetisna Sendjaja dalam memperjuangkan terwujudnya negara federasi di Indonesia mendapatkan momentumnya sepanjang dasawarsa kedua tahun 1950-an. Ketika itu sejumlah aktivis Sunda menginginkan mengubah bentuk susunan negara kesatuan ke federasi, bersamaan dengan merebaknya berbagai masalah yang bertalian dengan kesukuan, kedaerahan, atau provinsialistik di Indonesia.

Di Jawa Barat masalah ini timbul pertama-tama disebabkan oleh adanya kebijakan yang datang dari pemerintah pusat tentang pengklasifikasian masyarakat atas dua golongan, yaitu golongan *non* dan golongan *co*.<sup>8</sup> Pembagian ini diikuti pula dengan upaya dan desakan pergeseran kedudukan dalam pemerintahan dan lain-lain bagi orang-orang yang dianggap *co* secara tidak etis dan tanpa mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam jabatan tersebut (Ekadjati, 1995).

Jelas masalah *non* dan *co* ini telah membuat kecewa sejumlah aktivis Sunda. Cap penyebrang dan penghianat yang tersemat pada diri golongan *co* dipandang Soetisna Sendjaja sangat menyakiti perasaan orang Sunda dan dapat menimbulkan berbagai macam fitnah. Ia menganggap jika pemerintah telah berlaku sewenang-wenang karena dengan seenaknya menjatuhkan hukuman terhadap golongan yang dianggap *co* tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu,

<sup>7</sup> Paguyuban Pasundan mengundang dua orang tokoh, yaitu Mr. Sartono untuk menjelaskan tentang uni dan Sam Ratsoelangi untuk menjelaskan tentang federasi (Berita “Unie djeung Federatie” dalam *Sipatahoenan*. Bandung: 6 April 1931)

<sup>8</sup> Golongan *Non* (Non-Cooperator) sebutan bagi para pejuang RI pada masa revolusi yang konsekuensi tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Sementara golongan *Co* (Cooperator) yaitu mereka yang bekerjasama dengan Belanda, karena itu mereka dianggap penghianat bangsa. Salah satu kriteria bagi penggolongan ini untuk masyarakat Jawa Barat ialah ikut hijrah tidaknya ke Yogyakarta, setelah perjanjian Renville

sekalipun menurutnya itu sifatnya moril (Soetsen, 1956). Soetisna Sendjaja pun mencerahkan seluruh kekecewaannya itu dalam sepucuk surat terbuka yang ditujukan kepada BP-KNIP. Inti dari isi suratnya menyatakan tentang kepedihan hati orang Sunda yang mendalam berkaitan dengan adanya usaha pemerintah untuk menyingkirkan *kaum co* tanpa pemeriksaan sedikitpun mengenai pengkhianatannya. Akibat dari surat terbuka tersebut, Soetisna Sendjaja dipanggil untuk menghadap Presiden Soekarno (Rosidi, *et al.*, 2000: 632).

Masalah mengenai *non* dan *co* ini memicu bangkitnya kesadaran dan semangat kebersamaan di kalangan aktivis Sunda untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka membela dan mempertahankan diri, mencari identitas, dan memperjuangkan hak-hak dan kewajiban mereka. Maka dalam kurun waktu 1950-an, lahir beberapa organisasi sosial, politik, budaya Sunda, seperti Paguyuban Sunda, Daya Sunda, Front Pemuda Sunda (FPS), dan Dewan Komando Pemuda Sunda (DKPS) (Ekadjati, 1995). Bersamaan dengan itu, lahir pula partai politik Sunda bernama Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) yang dibentuk oleh organisasi Daya Sunda. Partai ini ikut serta dalam gelaran Pemilu 1955. Soetisna Sendjaja yang menjadi salah satu anggotanya, berhasil terpilih menjadi anggota Konstituante mewakili Gerpis (Rosidi, *et al.*, 2000: 632).

Organisasi-organisasi Kesundaan yang lahir dalam dekade 1950-an ini lambat laun mulai mengarahkan aktivitas-aktivitasnya pada kegiatan politik yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Pergolakan yang terjadi di daerah-daerah luar Jawa yang mempersoalkan kepincangan hubungan dan pembangunan antara pusat dan daerah mendorong pemuda beserta tokoh-tokoh Sunda terlibat aktif untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi kala itu. Mereka percaya jika masalah daerah adalah masalah penting dalam lingkup nasional (Rosidi, 1988: 145). Untuk mencari jalan konkret dan positif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkecamuk di Tanah Sunda, maka pada 4-7 November 1956, dengan sepengetahuan pemerintah setempat, diadakanlah Kongres Pemuda Sunda di Bandung (Ekadjati, 1995). Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari kongres tersebut yaitu tuntutan perubahan susunan negara dari kesatuan ke federasi sebagai bentuk pemerintahan yang diyakini dapat menjamin keamanan dan pelaksanaan sosial-ekonomi, serta kebudayaan di setiap daerah (Rosidi, *et al.*, 2000: 358).

Tentu saja tegaknya negara serikat sebagaimana yang diinginkan para pemuda (*nonoman*) Sunda sejalan dengan konsep pembangunan dan persatuan bangsa yang dicita-citakan oleh

Soetisna Sendjaja sejak lama. Soetisna Sendjaja pun bersimpati terhadap tekad dan antusiasme para *nonoman* yang ingin berpartisipasi menuntaskan berbagai macam persoalan yang terjadi di wilayah Sunda, terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Soetsen, 1956). Rasa simpatinya itu ia tunjukan dengan turut serta menyokong perjuangan yang sedang dilakukan oleh para *nonoman*. Bersama organisasi Daya Sunda, Soetisna Sendjaja pun menginisiasi terbentuknya Badan Musyawarah Sunda yang merupakan forum kerjasama dan gerakan organisasi-organisasi Kesundaan pada 1956 (Rosidi, *et al.*, 2000: 183).

Dalam rangka menyatukan visi perjuangan orang Sunda, Badan Musyawarah Sunda menyelenggarakan Konferensi Organisasi Kesundaan dan Tokoh-tokoh Sunda Pada 2 Desember 1956. Pada forum tersebut, Soetisna Sendjaja tampil menjadi salah satu pembicara utamanya. Ia berpidato mencerahkan segala keresahannya menyangkut kondisi memprihatinkan yang sedang dihadapi rakyat Indonesia, khususnya oleh masyarakat Sunda. Dalam pidatonya, Soetisna Sendjaja juga memberikan penilaian terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah gagal menunaikan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian bagi seluruh rakyatnya. Menurutnya, pemerintah hanya bisa meninabobokan rakyatnya dengan slogan “Merdeka!” semata. Sementara hal terpenting, yaitu mengisi ihwal kemerdekaan, pada faktanya masih jauh dari yang diharapkan. Meluasnya ketimpangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perpecahan yang terjadi di daerah-daerah, cukup menunjukan jika kemerdekaan yang sudah berumur 11 tahun itu, baginya seolah-olah tidak berarti apa-apa (Soetsen, 1956).

Perpecahan antarmasyarakat di berbagai daerah tidak luput dari perhatian forum yang mempertemukan organisasi-organisasi kesundaan ini. Muncul kekhawatiran di kalangan para aktivis Sunda, jika masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, akan berdampak pada terancamnya keutuhan bangsa dan tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Hal senada disampaikan pula oleh Soetisna Sendjaja dalam pidatonya, yang memandang bahwa terjadinya perpecahan adalah bukti hilangnya otoritas, kewibawaan, dan kedaulatan negara di tengah rakyat. Untuk memulihkan itu semua, tidak ada jalan lain selain pemerintah mesti sesegera mungkin merajut kembali tali persatuan yang sudah terlanjur kusut. Bagi Soetisna Sendjaja, inti dari kedaulatan negara adalah adanya persatuan bangsa yang kokoh. Menurutnya, sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa

menuntaskan berbagai persoalan dan kesemrawutan di tanah air, sebelum masalah perpecahan antarmasyarakatnya terselesaikan (Soetsen, 1956).

Kepercayaan penuh rakyat terhadap negara diyakini Soetisna Sendjaja sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya persatuan. Fenomena perpecahan di berbagai daerah yang memuncak pada pertengahan 1950-an itu disinyalir karena adanya kekecewaan dan ketidakpuasan dari daerah-daerah, terutama luar Jawa, terhadap kinerja pemerintah pusat (Ricklefs, 2010, hlm. 524). Hal tersebut juga dipandang Soetisna Sendjaja menjadi penyebab dari lunturnya rasa kepercayaan rakyat kepada negara. Sementara rasa kepercayaan tidak akan bisa tumbuh begitu saja secara instan, seperti halnya “*liefde op ‘t eerste gezicht*” (cinta pada pandangan pertama). Menurutnya rasa kepercayaan itu hanya akan tumbuh seiring dengan datangnya keadilan. Maksud keadilan di sini adalah adil menurut hukum, sebagaimana yang diungkapkan dalam pidatonya, “*hukum djalan djol kaadilan, dituturkeun ku kapertjajaan, breng saaleutan, kakara nepi kana kadaolatan. Tanpa ieu, ka ma’muran ngan semet impian*”<sup>9</sup> (Soetsen, 1956).

Bertalian dengan kesemrawutan yang terjadi, Soetisna Sendjaja meminta agar pemerintah dapat mempertimbangkan dengan baik usulan dari para *nonoman* Sunda yang menginginkan susunan negara serikat. Suatu bentuk negara yang dipercaya Soetisna Sendjaja dapat menjadi solusi atas segala persoalan yang sedang terjadi di tanah air, terutama menyangkut masalah persatuan, kepercayaan, dan keadilan. Soetisna Sendjaja melihat bahwa negara tunggal pada faktanya belum mampu memuaskan dan mempersatukan rakyat Indonesia yang beranekaragam. Seakan-akan menurutnya bangsa Indonesia ini dipaksa untuk bersatu, namun hati dan jiwa mereka saling menolak. Jika hal tersebut tidak secepatnya terselesaikan, cepat atau lambat bangsa Indonesia akan tercera-i-berai. Bagi Soetisna Sendjaja bersatu adalah suatu keharusan, namun yang menjadi sulit adalah bagaimana cara mempersatukannya, karena menurutnya semuanya harus merasa terpuaskan, jangan sampai muncul istilah yang penting dipuaskan dalam satu ikatan,

---

<sup>9</sup> Hukum berjalan, maka datang keadilan, diikuti dengan tumbuhnya rasa kepercayaan, jika semua itu berjalan beriringan, barulah akan sampai kepada kedaulatan. Tanpa itu semua, kemakmuran hanya akan sebatas impian.

namun rakyatnya tidak pernah merasa diikat karena ketidakpercayaan dan kekecewaan (Soetsen, 1956).

Soetisna Sendjaja menyadari jika federalisme yang sedang diperjuangkan para aktivis Sunda ini akan sulit mendapat tempat di tengah realitas politik kekuasaan yang gencar menolak tumbuhnya ide tersebut. Memanglah perasaan traumatis akan terpecahnya bangsa Indonesia akibat susunan negara federasi yang sempat dibentuk Belanda selama revolusi, membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk mengubur dalam-dalam ide federalisme (Caldwell & Utrecht, 2011: 184). Terlebih Soetisna Sendjaja menyaksikannya sendiri bagaimana sikap antipati presiden Soekarno terhadap ide federalisme di Indonesia yang disampaikannya saat pelantikan anggota Konstituante. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa ide federalisme sudah dikubur, dan yang memperjuangkan ide ini sama saja seperti orang yang menggali kubur dan menghidupkan kembali tulangbelulang orang yang dikubur. Pernyataan Soekarno itu dipandang Soetisna Sendjaja sebagai bentuk pembungkaman demokrasi dan telah memutus rantai partisipasi bangsa Indonesia yang ingin berusaha terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara (Soetsen, 1956).

Perjuangan Soetisna Sendjaja dalam mewujudkan negara federasi di Indonesia berlanjut di Konstituante. Di sana ia tampil menjadi representasi gerakan politik orang Sunda. Wacana federalisme selalu menjadi agenda utama yang ia suarakan setiap kali mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam sidang-sidang Konstituante. Soetisna Sendjaja meminta agar pemerintah dapat mempertimbangkan dengan baik usulan tentang bentuk susunan negara federasi yang tidak hanya diinginkan oleh orang Sunda saja, namun juga oleh banyak daerah di Indonesia. Sebagaimana yang ia sampaikan dalam sidang Konstituante pada 12 Mei 1959.

*“Saudara Ketua jang terhormat, untuk menghilangkan purbasangka dan tuduhan-tuduhan jang bukan-bukan, agar bermanfaat djuga kiranja, djika riwajat singkat mengenai idee federalisme jang tumbuh didaerah Sunda, disadjikan kepada hadirin jang mulia. Kami mengidam-idamkan persatuan jang bulat keluar dan kedalam keleluasaan daerah-daerah (suku-suku), untuk memperkembangkan wilayahnya, menurut qudrat-iradat dan kepribadiannja masing-masing, jang njata-njata nampak kepada umum. Daerah-daerah tidak melupakan persatuan. Oleh karena itu kemakmuran jang diharapkan sebagai hasil dari keleluasaan, bukan hanja semata-mata untuk daerah, tapi demi kepentingan keseluruhannja, demi ketertiban, kerahardjaan Negara Republik Indonesia merdeka, jang pada waktu itu, tahun 1917, baru tjita-tjita sadja. Idee itu, Saudara Ketua jang terhormat, hidup, ondaks sumpah para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.*

*Betapa tidak akan hidup terus, karena sumpah itu tidak bertentangan dengan paham kami. Kamipun –federalisten – hanja mengakui satu bahasa Negara, ialah bahasa Indonesia, hanja satu bangsa, Bangsa Indonesia, hanja satu tanah air, Negara Indonesia, jang sekali lagi pada waktu itu masih ada dalam alam gaib. Jang djadi rebutan, hanja tjara mengisi kemerdekaan, apakah di hari kemudian Negara dalam tjiptaan itu berbentuk federalistis atau unitaristis. Tidak ditjiptakan dua atau tiga negara oleh siapapun djuga.”<sup>10</sup>*

Jelaslah jika ide federalisme ini sudah hidup dan dicita-citakan orang Sunda sejak lama. Adapaun ide tersebut dimunculkan kembali oleh para aktivis Sunda pada 1956, menurut Soetisna Sendjaja itu bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru, karena semangat yang dibangun masih sama dengan apa yang diperjuangkan para pendahulunya ketika bangsa Indonesia masih ada dalam kekuasaan kolonial. Ia pun menegaskan jika mencuatnya ide federalisme di kalangan orang Sunda merupakan respon dari ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku. Menurutnya sudah seharusnya pemerintah melihat usulan tersebut semata-mata sebagai upaya yang datang dari orang Sunda untuk terlibat dalam urusan masalah pengelolaan negara dan menuntaskan berbagai macam persoalan yang terjadi di wilayah Sunda<sup>11</sup>.

Bagi Soetisna Sendjaja, stigma negatif yang dibangun oleh pemerintah terhadap kaum federalis, terutama mengaitkannya dengan ancaman masalah kesukuan dan kedaerahan adalah suatu sikap yang keliru. Menurutnya bahwa apa yang ditakutkan pemerintah bertalian dengan masalah kesukuan dan kedaerahan dapat juga terjadi dalam negara kesatuan. Justru pada faktanya tindakan pemerintah pusat yang tidak bisa memahami keinginan dari daerah-daerah dipandang Soetisna Sendjaja lebih berpotensi menyulut dan membangkitkan sentimen-sentimen kesukuan dan kedaerahan

*“adapun mengenai jang dikemukakan Pemerintah jang bertalian dengan kesukuan dan kedaerahan, dapat saja katakana, bahwa didalam negara kesatuanpun kesukuan/kedaerahan itu tetap ada. justru sebaliknya Saudara Ketua jang terhormat, tindakan Pusat negara kesatuan, jang tidak bisa merabrabu isi dada daerah, jang tidak jarang membangkitkan sentimen-sentimen kesukuan itu.”<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup> Pidato Soetisna Sendjaja dalam Sidang Konstituante yang dilaksanakan pada 12 Mei 1959a. Sekretariat Negara. Jakarta, Mei 1959.

<sup>11</sup> Pidato Soetisna Sendjaja, ibid., 1959a

<sup>12</sup> Pidato Soetisna Sendjaja dalam Sidang Konstituante yang dilaksanakan pada 25 Mei 1959a. Sekretariat Negara. Jakarta, Mei 1959.

Susunan negara serikat yang diinginkan Soetisna Sendjaja beserta para aktivis Sunda pada akhirnya hanya menjadi wacana yang belum bisa terealisasikan. Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 menegaskan kembalinya pemerintahan Indonesia pada rumusan UUD 1945 yang menghendaki negara kesatuan, sekaligus mengubur mimpi Soetisna Sendjaja untuk mewujudkan susunan negara serikat di Indonesia. Meskipun begitu, ide federalisme yang disuarakan oleh para aktivis Sunda telah mewarnai dinamika politik nasional sepanjang pertengahan sampai akhir tahun 1950-an. Hal ini juga menjadi suatu bukti besarnya spirit persatuan dan pembangunan, serta kepedulian orang Sunda terhadap masalah pengelolaan pemerintahan.

## **SIMPULAN**

Ide federalisme yang Soetisna Sendjaja suarakan sepanjang pertengahan sampai akhir 1950-an ini, berkorelasi dengan apa yang diperjuangkannya pada saat periode pergerakan tentang masalah persatuan bangsa dan pembangunan daerah. Soetisna Sendjaja melihat bahwa negara tunggal pada faktanya belum mampu memuaskan dan mempersatukan rakyat Indonesia yang beranekaragam. Menurut Soetisna Sendjaja, beragam persoalan, terutama menyangkut masalah kesukuan dan kedaerahan yang memuncak pada pertengahan tahun 1950-an disinyalir sebagai bentuk dari kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah pusat yang tidak mampu memahami keinginan masyarakat di daerah-daerah. Susunan negara federasi dipercaya Soetisna Sendjaja dapat menjadi solusi atas segala persoalan yang sedang terjadi di tanah air itu. Dengan federasi, bangsa-bangsa yang ada di Indonesia menurutnya akan mendapat keleluasaan untuk mengelola daerahnya secara maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amien, S. (2013). *Perjuangan Paguyuban Pasundan 1914-1942*. Bandung: Pustaka Jaya
- Berita “Unie djeung Federatie” dalam *Sipatahoenan*. Bandung: 6 April 1931
- Caldwell & Utrecht. (2011). *Sejarah alternatif Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- Ekadjati, E. (1995). *Sunda, Nusantara, dan Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah*. (makalah). Disampaikan dalam orasi ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung, 25 September 1995.

- Lubis, N. (2003). *Sejarah Tatar Sunda*. Bandung: Satya Historika
- Mujaffar, I. (2017). *Pemikiran Politik Soetisna Sendjaja Tahun 1918-1942*. (Skripsi). Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Pringgodigdo, AK. (1994). *Sejarah pergerakan rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1959a). Pandangan Umum Soetisna Sendjaja dalam Sidang Konstituante pada 12 Mei 1959. Sekretariat Negara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1959a). Pandangan Umum Soetisna Sendjaja dalam Sidang Konstituante pada 25 Mei 1959. Sekretariat Negara. Jakarta
- Ricklefs, M.C. (2010). *Sejarah Indonesia modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi
- Rosidi, A. (1988). *Hurip Waras: Dua Panineungan*. Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Rosidi, A *et al.* (2000). *Ensiklopedi Sunda: alam, manusia, dan budaya*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Soetsen. (1918). “Panoehoen” dalam surat kabar *Padjadjaran*. Bandung: 14 September 1918.
- \_\_\_\_\_. 1925). “Sparatisme?” dalam surat kabar *Sipatahoenan*. Tasikmalaya: 14 Juli 1925.
- \_\_\_\_\_. (1956). “Pidato Pak Soetsen; Dina Konpersensi Organisasi Kasundaan djeung sepuh2 Sunda tgl. 2 Desember 1956, di Bandung” dalam Majalah *Kalawarta Kudjang*. Bandung: Desember 1956.
- Suharto. (2002). *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942: profil pergerakan etnonasionalis*. Bandung: Satya Historika.
- Sundhaussen, U. (1988). *Politik Militer Indonesia 194501967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3S
- Yahya, I. (2015). “Mapag kongres Paguyuban Pasundan 2015: akar Paguyuban Pasundan” dalam surat kabar *Kabar Priangan*. Tasikmalaya: 24 Agustus 2015